

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era otonomi daerah saat ini, transparansi mengenai pengelolaan keuangan pemerintah menjadi sangat penting. Masyarakat berharap bahwa otonomi daerah menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat, serta membudayakan dan menciptakan ruang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pengelolaan keuangan yang transparan menjadi tuntutan masyarakat guna terciptanya tata kelola yang baik (*good government governance*). Untuk mewujudkan *good government governance*, salah satunya yaitu dengan melakukan reformasi dalam laporan keuangan. Pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat dari masyarakat itu sendiri (Aliyah, 2012).

Terdapat 3 mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif, transparan dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan *good governance* yaitu : (1) mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat, (2) memperbaiki *internal rules* dan mekanisme pengendalian, dan (3) membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan.

Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2006).

Thompson (2003) dalam Tuasikal (2007) menegaskan akuntabilitas merupakan kunci dalam mencapai *good governance*. Sedangkan transparansi memiliki arti keterbukaan, yaitu keterbukaan pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang merupakan bagian dari pelayanan publik. Pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Masyarakat memiliki hak dasar untuk tahu dan memperoleh informasi mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan mengapa suatu kebijakan atau program dilakukan serta bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya (Silver, 2005).

Pemerintah daerah sangat menyadari akan pentingnya transparansi dalam tata kelola keuangan daerah, hal ini dapat dibuktikan dengan terbitnya Perda terkait transparansi dan partisipasi masyarakat sebelum Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terbit. Akan tetapi, pada praktiknya peraturan-peraturan daerah ini masih sulit untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah terutama pada SKPD sebagai level pelaksana. Tidak adanya transparansi publik akan menimbulkan dampak negatif yang sangat luas dan dapat merugikan masyarakat. Dampak negatif yang akan timbul dikarenakan tidak adanya transparansi adalah dapat menimbulkan distorsi

dalam alokasi sumber daya, memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat, menyuburkan praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan (Ridha dan Basuki, 2012).

Menurut Ridha dan Basuki (2012), transparansi pada hakekatnya dapat memberikan dampak yang positif dalam organisasi. Kebanyakan peraturan daerah tentang transparansi yang ada tidak memiliki sanksi sehingga sulit dalam pelaksanaan dan penegakkannya. Oleh karena itu, butuh komitmen yang tinggi oleh segenap jajaran pemerintah daerah untuk menerapkan transmisi pengelolaan keuangan.

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Ridha dan Basuki, 2012).

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan; investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana.

Tekanan eksternal adalah tekanan yang berasal dari luar SKPD seperti peraturan (regulasi), eksekutif, masyarakat, dan sebagainya. Adanya tekanan eksternal dapat berakibat pada praktik-praktik penerapan transparansi

pelaporan keuangan SKPD yang hanya bersifat formalitas untuk memperoleh legitimasi.(Ridha dan Basuki, 2012).

Faktor lain yang mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan adalah ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan yang tinggi akan menyebabkan manajer sulit untuk menyusun perencanaan dan pengendalian organisasi yang akurat. Perencanaan yang disusun dalam situasi ketidakpastian lingkungan yang tinggi akan menjadi problemalitas, karena adanya ketidakmampuan manajer untuk memprediksi kondisi dimasa mendatang. Ketidakpastian lingkungan adalah kecendrungan kelompok untuk mempraktekkan dirinya pada perilaku organisasi lain muncul sebagai tanggapan untuk suatu ketidakpastian akan suatu standar tertentu.

Ketidakpastian lingkungan dapat disebabkan juga oleh berbagai hal di luar organisasi, seperti perubahan peraturan yang cepat dalam satu rentang waktu tertentu, adanya peraturan yang berbeda antara satu dengan yang lain, dan sebagainya. Ketidakpastian lingkungan termasuk di dalamnya *benchmarking* dan mengidentifikasi praktik terbaik yang ada di lapangan (Tuttle dan Dillard, 2007).

Menurut Sumarno (2005) Komitmen Organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap sasaran dan nilai yang ingin dicapai organisasi dan lebih mengusahakan yang terbaik demi tujuan organisasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen terhadap organisasi antara lain karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan pengalaman kerja (Putri, 2010:5). Komitmen organisasi mempunyai tiga komponen yaitu

keyakinan yang kuat dari seseorang dan penerimaan tujuan organisasi, kemauan seseorang untuk berusaha keras bergantung pada organisasi, dan keinginan seseorang yang terbatas untuk mempertahankan keanggotaan (Putri,2010:5).

Saat ini penelitian empiris tentang transparansi pelaporan keuangan masih belum banyak diteliti. Padahal transparansi mengenai pengelolaan keuangan pemerintah sangat penting. Pengelolaan keuangan yang transparan menjadi tuntutan masyarakat guna terciptanya tata kelola pemerintah yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen organisasi terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Pekanbaru.

Saufi Iqbal Nasution (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sukhemi (2011) melakukan penelitian tentang tingkat pengungkapan laporan keuangan terhadap transparansi keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan tidak berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan daerah.

Johanes (2013) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa tekanan eksternal dan komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi keuangan. Sedangkan, ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Ridha (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen manajemen terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Berdasarkan ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian ulang. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ridha dengan judul pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD Kota Yogyakarta. Yang membedakan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggantian variabel komitmen manajemen dengan komitmen organisasi serta objek penelitiannya, yaitu peneliti mengambil objek di Kota Pekanbaru.

Alasan memilih Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai objek penelitian ini karena adanya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK

Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kota Pekanbaru pada semester I tahun 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sahril, S.H. dan Walikota Pekanbaru, H. Firdaus di Auditorium Kantor Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Riau, Senin, 1 Juni 2015 pukul 10.00 WIB. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 dikemas dalam tiga buku. Buku I adalah LHP yang memuat Laporan Keuangan Pemerintah dan opini atas Laporan Keuangan tersebut. Buku II memuat atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III adalah LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015.

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu: (1) Penyajian piutang pajak reklame tidak akurat; (2) Nilai piutang retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak dapat diyakini kewajarannya; (3) Aset tetap Pemerintah Kota Pekanbaru pada Neraca per 31 Desember 2014 belum disajikan secara lengkap dan akurat; dan (4) Tanah Hak Pengelolaan (HPL) belum tercatat pada Neraca Kota Pekanbaru.

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, diantaranya yaitu:

(1) Pemberian Insentif Pemungutan PPJU PLN tidak sesuai ketentuan; (2) Pemberian Belanja Subsidi kepada Trans Metro Pekanbaru tidak sesuai ketentuan; (3) Pengelolaan Belanja Hibah belum sepenuhnya sesuai ketentuan; (4) Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal pada Enam BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru belum ditetapkan; dan (5) Terdapat 27 unit kendaraan dinas dan 18 laptop belum dikembalikan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru. (pekanbaru.bpk.go.id)

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Survei pada Satuan Kerja Perangkat daerah Pemerintah Kota Pekanbaru)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis mengidentifikasi yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh tekanan eksternal terhadap transparansi pelaporan keuangan pada Pemerintahan Kota Pekanbaru.
2. Bagaimana pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap transparansi pelaporan keuangan Pemerintahan Kota Pekanbaru.
3. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap transparansi pelaporan keuangan Pemerintahan Kota Pekanbaru.

4. Bagaimana pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen organisasi terhadap transparansi pelaporan keuangan Pemerintahan Kota Pekanbaru.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh tekanan eksternal terhadap transparansi pelaporan keuangan pada Pemerintahan Kota Pekanbaru.
2. Pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap transparansi pelaporan keuangan pada Pemerintahan Kota Pekanbaru.
3. Pengaruh komitmen organisasi terhadap transparansi pelaporan keuangan pada Pemerintahan Kota Pekanbaru.
4. Pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen organisasi terhadap transparansi pelaporan keuangan pada Pemerintahan Kota Pekanbaru.

Apabila tujuan ini dapat dipenuhi maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, bermanfaat untuk mengembangkan wawasan dan memberikan pemahaman mendalam mengenai pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen organisasi terhadap transparansi pelaporan keuangan.

2. Bagi instansi terkait, bermanfaat untuk dapat menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah dalam mengevaluasi transparansi pelaporan keuangan, khususnya pemerintah daerah Kota Pekanbaru.
3. Bagi peneliti lain, bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen organisasi bagi peneliti lainnya serta dapat juga digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama dan melakukan penyempurnaan penelitian ini.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara singkat isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini membahas tentang telaah pustaka, kerangka pemikiran, model penelitian dan hipotesis yang menguraikan teori tentang pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen organisasi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menyajikan metode penelitian yang terdiri dari populasi sampel, jenis dan sumber data, alat analisis serta pengujian hipotesis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini memberikan gambaran umum tentang Kota Pekanbaru yang menjadi objek penelitian.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang diambil dan saran yang diberikan sehubungan dengan hasil penelitian.